

ANALISIS KOMUNIKASI STRATEGIS DESA KUMBANG SEBAGAI DUTA NTB TINGKAT NASIONAL DALAM PROGRAM DESA BENDERANG INFORMASI PUBLIK 2021

Yulia Rahmah
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Mataram

ABSTRAK

Dalam program desa benderang informasi publik (DBIP) Desa Kumbang terpilih mewakili NTB dalam tingkat nasional pada tahun 2021. Penelitian ini untuk menganalisis komunikasi strategis Desa Kumbang sebagai duta NTB tingkat nasional dalam DBIP 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Informan dari penelitian ini terdiri dari informan kunci, dan informan pendukung. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan, tahapan untuk menguji keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi strategis desa Kumbang dapat dikatakan berhasil, karena penghargaan yang didapat berdasarkan penilaian internal dan eksternal. Faktor internal diperoleh berdasarkan penilaian masyarakat Desa Kumbang sendiri yang diperoleh melalui survei. Acuan keberhasilan komunikasi strategis dari sisi eksternal yaitu berdasarkan penilaian dari pihak di luar Desa Kumbang, yang dalam hal ini yaitu para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi Publik.

Kata kunci: DBIP, Desa Kumbang, Komunikasi Strategis, Informasi Publik

ABSTRACT

In the bright public information village program (DBIP), Kumbang Village was chosen to represent West Nusa Tenggara (NTB) at the national level in 2021. This study analyzes the strategic communication of Kumbang Village as the NTB representative at the national level in DBIP 2021. This research uses a qualitative-descriptive research method. The informants in this study consist of key informants and supporting informants. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and data verification. Meanwhile, the stages to test the validity of the data use source triangulation techniques. The results of this study indicate that the strategic communication of Kumbang village can be considered successful because of the awards received based on internal and external assessments. Internal factors were obtained based on assessments from the Kumbang Village community itself obtained through a survey. The reference for the success of strategic communication from the external perspective is based on assessments from parties outside Kumbang Village, in this case, the assessors for the bright public information village program.

Keywords: DBIP, Kumbang Village, Strategic Communication, Public Information

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatunya memiliki aturan, salah satu aturan yang berlaku di Indonesia adalah kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik dimana badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik. Pentingnya keterbukaan informasi publik pada pemerintahan yakni dalam mengimplementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya dalam

pemenuhan hak asasi manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat juga dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*.

Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai *good governance* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi (Sedarmayanti, 2004: 22). Dengan adanya amanat UU keterbukaan informasi publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

Desa benderang informasi publik (DBIP) merupakan program desa yang didorong untuk mengimplementasikan UU keterbukaan informasi publik sehingga dalam pengelolaan pemerintahan menjadi lebih transparan. Desa benderang informasi publik ini merupakan pelaksanaan dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*. Dalam undang-undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, mendapatkan jaminan dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Melalui program desa benderang informasi publik (DBIP) ini, perangkat desa dapat membagikan informasi kepada publik dengan cepat, hemat waktu dan mudah. Dengan adanya program ini diharapkan perangkat desa di NTB dapat bersikap terbuka pada masyarakat, diantaranya terkait dana, surat menyurat, informasi seputar desa, informasi pelayanan masyarakat dan lain sebagainya. Agar masyarakat mengetahui dengan jelas berbagai informasi yang disampaikan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Sejauh ini sudah ada 10 desa terbaik yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yaitu; Desa Sendang Wonogiri (Jawa Tengah), Desa Punggul (Bali), Desa Blang Kolak 1 (Aceh Tengah, Aceh), Desa Cibiru Wetan (Bandung, Jawa Barat), Desa Kumbang (Lombok Timur, NTB), Desa Kabuna (Belu, NTT), Desa Pohe Sanana (Maluku

Utara), Desa Karang Sari Kulonprogo (DIY), Desa Kedungsumber (Bojonegoro, Jawa Timur), dan Desa Teluk Kapuas Kubu Raya (Kalimantan Barat) (Tira Santia, September 2021).

Dengan adanya keterbukaan dari perangkat desa pada masyarakat, masyarakat dapat mengetahui persoalan yang dihadapi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014. Terkait hal tersebut, seluruh level pemerintahan harus hadir dalam kebersamaan, sepakat dengan komisi informasi, pemerintah desa harus disupport melalui program desa benderang informasi publik (DBIP) sehingga seluruh program dapat diketahui dengan jelas oleh masyarakat.

Dalam program desa benderang informasi publik (DBIP) terdapat desa yang terpilih mewakili NTB dalam tingkat nasional pada tahun 2021 desa yang terpilih adalah Desa Kumbang. Desa Kumbang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur NTB. Desa Kumbang menduduki peringkat kedua dari hasil penilaian di tingkat Provinsi NTB. Desa Kumbang masuk dalam 10 besar dari 34 provinsi di Indonesia dan berada pada urutan pertama pada lomba DBIP Tahun 2021 dan keluar sebagai Juara Duta NTB di tingkat Nasional. (M.Syahrul Utama. April 2017).

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai bagaimana analisis komunikasi strategis desa Kumbang sebagai duta NTB tingkat nasional dalam program desa benderang informasi publik 2021 dalam menyampaikan informasi terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan desa Kumbang kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa Kumbang.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) (dalam Sugiyono 2008). menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Kirk & Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Metode Penelitian Komunikasi*, yakni: “Metode deskriptif, yaitu dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat” (Rakhmat, 2002:22).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Komunikasi Strategis Desa Kumbang Untuk Keterbukaan Informasi Publik

Upaya untuk menjalankan komunikasi strategis untuk keterbukaan informasi public muncul berdasarkan perintah undang-undang yang menuntut hal tersebut. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang - undang tersebut juga mengamankan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam kaitannya dengan pemerintah desa, kewajiban tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dimana Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada desa. Tugas Perangkat Desa Kumbang yang penting yaitu mampu menyediakan data yang bisa diandalkan, yaitu valid dan sinkron. Hal ini karena sangat menyangkut kehidupan masyarakat desa. Misalnya seperti data penduduk. Data penduduk yang paling krusial disini yang benar menjadi kunci pertama dalam pergerakan menuju pemerintahan yang bagus. Sehingga jika ada yang tidak sinkron pemerintah desa bisa tahu dari adanya ketersediaan data tersebut. Dalam upaya menyediakan data tersebut Desa Kumbang memaksimalkan peran PPID.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik (ppid.ntbprov.go.id, 2017). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa. PPID Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa (Desakumbang.id).

Guna menjalankan peran tersebut, Desa Kumbang membangun perencanaan dengan terlebih dahulu melakukan studi banding. Salah satu lokasi studi banding para perwakilan pemuda Desa Kumbang pada 2016 adalah Desa Sri Mulyo. Alasan Desa Sri Mulyo menjadi lokasi studi banding lantaran telah mengembangkan desa digital. Desa ini didatangi karena adanya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Desa lain yang menjadi tujuan studi perwakilan pemuda dan perangkat Desa Kumbang adalah Desa Wisata Dewi Sambi di Sleman, Yogyakarta. Desa ini bekerjasama dengan Telkom untuk membangun konsep Smart Village, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu Tata Kelola Pemerintahan (*Smart Governance*), Tata Kelola Niaga (*Smart Economy*) dan Tata Sosial (*Smart Society*).

Informasi yang dihimpun dari Karang Taruna Desa Kumbang, anggaran para pemuda berangkat studi banding ditampung dengan Dana Desa. Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Ketua karang taruna menyampaikan bahwa penggunaan dari Dana Desa (DD) juga penting untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, selain hanya pembangunan yang sifatnya fisik. Hal ini sesuai juga dengan peraturan pemerintah pada Pasal 1 angka 2 PP 60 / 2014 yang diubah menjadi PP 8/2016 bahwa dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (BPK RI, 2017).

Bahkan sejak 2011 Yogyakarta sudah meraih penghargaan sebagai yang terbaik dalam E-Government Award dan Smart City Award 2011 se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi. Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan khusus Smart Leadership atau kepemimpinan terbaik, kreatif dan inovatif dalam mengelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2011). Sebelum desa-desa di NTB, desa-desa di Yogyakarta menjadi tujuan studi karena dalam urusan pemerintahan pelayanan masyarakat dan juga menghidupkan perekonomian masyarakat banyak yang sudah menggunakan teknologi digital. Pemuda Desa Kumbang juga ingin desanya juga melakukan hal yang sama sebagaimana penyampaian dari Ketua Karang Taruna Desa Kumbang.

Sekembalinya dari studi banding tersebut, Desa kumbang diberi semacam layanan digital yakni *website* desa yang lebih optimal dan sampai sekarang ini masih digunakan dan masih dioptimalkan sebagai sarana distribusi informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Menurut Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Sistem Informasi Desa (SID yang dikembangkan di 24 pemerintah kabupaten/kota awalnya merupakan sebuah aplikasi *website* dirancang untuk menyediakan

informasi profil desa, data kemiskinan, dan kependudukan serta memfasilitasi layanan persuratan, administrasi kependudukan, dan lainnya.

Berdasarkan data dari informan selaku Kepala Desa Kumbang, komunikasi strategis Desa Kumbang dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu terbuka dalam segi apapun yang menyangkut tata kelola desa, misalnya terbuka melalui pengelolaan APBDES, baik dari sumber dana, penggunaannya, dan apapun itu harus terbuka kepada masyarakat.

Keterbukaan yang dilaksanakan yang diberikan kepada pemerintahan desa kepada masyarakat itu merupakan kewajiban pemerintah desa. Prinsip keterbukaan ini membuahkan prestasi bagi desa Kumbang. Mulai dari 2017 mempunyai anugrah dari provinsi mengikuti anugrah sensasional masuk dalam 5 besar dalam keterbukaan informasi publik. Dalam keterbukaan informasi publik ini dijalankan Desa Kumbang dengan menyalurkan informasi tingkat desa kepada masyarakatnya, dengan informasi yang valid. Hal itu yang dibutuhkan pemerintah, yaitu baik dalam masalah apapun dan apapun program-program yang dicanangkan oleh desa yang dititip oleh provinsi, kabupaten, bahkan pusat desa selalu menyalurkan informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi sejalan dengan butir visi misi desa yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa dan menciptakan sistim pemerintahan yang baik dan demokratis. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah maka hasil yg diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Konsep komunikasi strategis di sini diletakkan sebagai bagian dari penggunaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pendekatan Desa Kumbang tersebut menunjukkan suatu sikap asertif. Perilaku asertif sangat penting untuk dimiliki oleh pemimpin desa agar ia mampu untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungannya. Kepemimpinan asertif adalah gaya komunikasi di mana orang mengekspresikan pikiran, ide, dan harapan mereka dengan tim mereka dengan cara yang percaya diri dan penuh perhatian. Jenis kepemimpinan ini melibatkan kolaborasi dengan orang-orang di semua tingkatan organisasi. Komunikasi asertif strategi komunikasi yang bersifat langsung dan penuh hormat (Schein, 2010). Bersikap asertif memberi masyarakat peluang terbaik untuk berhasil menyampaikan pesan mereka.

Ketika prinsip keterbukaan informasi publik itu sudah dilaksanakan nantinya masyarakat akan tahu informasi-informasi penting desa. Contohnya mengenai APBN/APBDES, masyarakat dapat mengetahui

rincian sumber dana penerimaan desa yang berjumlah lebih dari dua miliar rupiah, termasuk apa saja kategori-kategori yang bisa didanai APBDES dan kemana saja alokasi anggaran pemerintah desa. Semua informasi penting tersebut dimuat dalam sarana yang dapat diakses oleh masyarakat dengan semudah-mudahnya dan seluas-luasnya. Salah satu bentuk penerapannya yaitu apapun yang diprogramkan oleh Desa Kumbang publikasikan melalui website desa (kumbang.desa.id/), media sosial desa, maupun radio desa.

Strategi Dalam Komunikasi Strategis Desa Kumbang Untuk Keterbukaan Informasi Publik

Strategi komunikasi adalah rencana taktis untuk mencapai tujuan komunikasi. Strategi harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal organisasi, serta menyesuaikan dengan karakteristik sasaran komunikasi. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah maka hasil yg diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi, dan tenaga. Konsep komunikasi strategis di sini diletakkan sebagai bagian dari penggunaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai (Sriramesh & Vercic, 2012).

Komunikasi strategis juga digunakan ketika menerapkan perubahan atau mengembangkan strategi baru. Terkadang, mungkin tidak ada jalan yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan strategi dan teknik komunikasi strategis. Komunikasi strategis dalam pemerintahan bukanlah bidang baru. Munculnya media sosial telah menghadirkan pola baru dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi strategis secara efektif sebagaimana pandangan Kurnianti (2018). Media sosial dioptimalkan oleh Desa Kumbang untuk memberi beragam informasi dan pelayanan. Media sosial memungkinkan orang dan organisasi untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara instan. Kemampuan untuk terhubung dan berinteraksi ini telah meningkatkan kemudahan dalam memberi layanan kepada masyarakat.

Desa Kumbang terus berupaya secara kontinu dan konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keadaan masyarakat desanya khususnya dalam hal transparansi keadaan keuangan desa. Hasil observasi penulis dalam proses meneliti pendekatan komunikasi strategis Desa Kumbang menunjukkan kesimpulan bahwa desa tersebut menerapkan dua pendekatan strategi komunikasi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi langsung dan tidak langsung merupakan dua bentuk komunikasi yang berbeda dalam cara penyampaiannya dan penggunaannya.

Komunikasi langsung terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima pesan. Sedangkan, komunikasi tidak langsung melibatkan media atau alat untuk menyampaikan pesan. Berikut penjabaran dari masing-masing pendekatan yang digunakan Desa Kumbang.

1) Strategi Komunikasi Langsung

Komunikasi langsung terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima pesan. Dalam komunikasi langsung, pengirim pesan dapat melihat respons penerima secara langsung, misalnya dalam bentuk ekspresi wajah atau gerakan tubuh. Komunikasi langsung biasanya lebih cepat karena pesan dapat disampaikan secara langsung dan respons bisa diterima dengan cepat. Komunikasi langsung lebih cocok digunakan dalam situasi yang memerlukan interaksi langsung, seperti dalam rapat, presentasi, atau negosiasi.

Pendekatan langsung atau secara tatap muka (*face to face*) juga dijalankan oleh Desa Kumbang. Khalayak yang ingin dijangkau dengan pendekatan ini utamanya yang kurang memiliki akses ke teknologi informasi maupun yang belum bisa membaca serta warga desa secara umum.

Sebelum adanya website desa, media sosial maupun radio desa semua informasi penting maupun perencanaan desa langsung disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa Kumbang. Yang dilakukan secara keterbukaan dengan melakukan interaksi secara langsung antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam sebuah musyawarah. Ketika prinsip keterbukaan informasi publik itu sudah dilaksanakan nantinya masyarakat akan tahu informasi-informasi penting desa. Contohnya mengenai APBN/APBDES, masyarakat dapat mengetahui rincian sumber dana penerimaan desa yang berjumlah lebih dari dua miliar rupiah, termasuk apa saja kategori-kategori yang bisa didanai APBDES dan kemana saja alokasi anggaran pemerintah desa. Semua informasi penting tersebut dimuat dalam sarana yang dapat diakses oleh masyarakat dengan semudah-mudahnya dan seluas-luasnya.

Dibutuhkan keterlibatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan transparan. Perencanaan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif juga akan dapat terwujud apabila tahapan perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Karena itu, Desa Kumbang juga berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat baik dengan cara rumah ke rumah maupun lewat mengumpulkan warga dalam pertemuan. Proses komunikasi langsung melalui pertemuan warga yang bersifat lebih partisipatif di Desa Kumbang contohnya dapat berupa

sosialisasi atau penyuluhan, jajak pendapat, musyawarah dusun, musyawarah desa, lokakarya, musrenbang desa (Musyawarah Rencana Pembangunan), dan rapat RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa (M. Taufik, 2022).

Menurut M. Taufik selaku kepala desa, hal ini sebagai salah satu upaya keterbukaan informasi publik dan ketransparanan Pemerintah Desa kepada masyarakat yang memiliki keluhan, pertanyaan, kritik dan saran membangun terhadap Pemerintah Desa, agar memanfaatkan fasilitas tersebut semaksimal mungkin, sehingga kebijakan publik dan pelayanan dari Pemerintah Desa Kumbang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

2) Strategi Komunikasi Tidak Langsung

Komunikasi langsung dan tidak langsung dijalankan dengan saling terintegrasi oleh Desa Kumbang. Contohnya yaitu ketika selesai rapat musyawarah desa (langsung) terkait dengan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) langsung disampaikan dan dipajang di setiap dusun (tidak langsung). Di desa kumbang ada 6 wilayah atau 6 dusun dan semuanya memiliki papan reklame desa. Melalui papan reklame desa dimanfaatkan untuk memuat infografis desa mulai dari berapa dana desa yang didapat dan kemana arah penggunaannya. Pengelolaan keuangan desa tersebut dalam mewujudkan *good governance* yang dilihat dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sekretaris Desa Kumbang mengaku awalnya tidak mengentahui dari upaya komunikasi tersebut Desa Kumbang masuk dalam nominasi keterbukaan informasi publik.

Menurut Prayitno, Subagiyo, Dinanti, Sari (2021) dalam buku *Smart Village: Mewujudkan SDG's Desa Berbasis Keterpaduan Pengelolaan dan Inovasi Digital*, Smart Governance atau tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Smart Economy merupakan pembangunan tata kelola perekonomian yang mampu menghadapi tantangan dan adaptif terhadap perubahan sehingga terwujudnya ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Smart Society atau masyarakat yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.

Pendekatan di atas merupakan bentuk komunikasi strategis karena dijalankan sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi desa. Desa Kumbang telah menjalankan komunikasi strategis yang konsisten dengan misi, visi, nilai-nilai desa yang sudah disampaikan di atas. Hal ini sesuai pendapat Hallahan (2007) bahwa Komunikasi adalah strategis ketika benar-benar konsisten dengan misi, visi, nilai-nilai organisasi dan ketika mampu meningkatkan posisi strategis dan daya saing di antara para pesaing mereka. Komunikasi strategis Desa Kumbang untuk tujuan keterbukaan informasi, sesuai dengan poin dalam visi misi Desa Kumbang yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa (Data Program Desa Benderang Informasi, 2021).

Dengan adanya *website* desa diharapkan sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi publik serta promosi potensi-potensi wisata desa dan produk-produk unggulan desa. Selaras dengan fungsi website desa sebagai media informasi dan promosi. Website desa juga dapat membantu meningkatkan pelayanan pemerintah desa (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019). Hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa akan lebih jelas dalam memberikan beragam informasi yang berkaitan dengan layanan yang dilakukan oleh perangkat desa. Website Desa Kumbang di laman kumbang.desa.id dibagikan info lengkap mengenai perangkat desa, pelayanan, informasi keuangan, PPID, produk hukum, aduan, IKM, kegiatan desa, dan sebagainya.

Berbagai bentuk pelayanan di atas dapat dibangun berkat keterlibatan aktif pemuda dalam tata kelola desa. Pemuda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penulis menyimpulkan pandangan menurut Ketua Karang Taruna Desa Kumbang, bahwa di Yogyakarta sudah banyak dibentuk desa digital. Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian.

Selain komunikasi melalui *e-government* (layanan desa via website), strategi yang kedua adalah Desa Kumbang terus mengelola kanal interaksi dengan masyarakat seperti media sosial agar tetap berjalan untuk mengisi segala informasi tentang kegiatan masyarakat. Desa Kumbang

juga melengkapi diri dengan peralatan untuk menjalankan radio desa. Desa Kumbang membentuk KMC (kumbang media center) yang dilengkapi perpustakaan dan radio desa. Bahkan Desa Kumbang menjalankan aktifitas streaming dengan berbagai media yang ada. Menurut Saleh, Nugroho, Wibowo, dan Bassar (2021), *streaming* adalah sebuah teknologi pengiriman data baik video, maupun audio dalam bentuk yang sudah dikompresi lewat jaringan internet. Dasar dari Desa Kumbang dalam membuat KMC atau radio desa ini adalah Ketika masyarakat yang misalnya masih buta huruf atau belum bisa membaca papan reklame yang sudah terpasang di setiap dusun, maka tetap dapat memperoleh informasi dari desa.

Pelaksanaan komunikasi strategis untuk keterbukaan informasi publik juga tetap memiliki kendala. Misalnya kendala untuk masyarakat yang tidak mengerti dengan menggunakan gadget, Desa Kumbang memberi solusi dengan menggunakan KMC atau media Center atau radio media center. Informasi juga tetap diumumkan melalui radio untuk lebih menjangkau masyarakat yang tidak mempunyai akses ke media sosial. Pendekatan Desa Kumbang juga untuk menjangkau masyarakatnya yaitu dengan menempelkan pamflet-pamflet mengenai informasi penting ataupun untuk pengumuman. Kendala yang kedua yaitu masih minimnya anggaran dana dari seluruh media, dana yang diberikan oleh APBDES masih sangat kecil untuk mengembangkan PPID.

Menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Kumbang juga, bahwa mereka telah menerapkan sistem pelayanan yang dicanangkan PPID untuk masyarakat agar tidak boleh lebih dari dua menit menunggu antrian dalam artian dalam melakukan administrasi, seperti pembuatan surat menyurat. Pemerintah desa adalah institusi terdepan yang memberikan layanan kepada masyarakat, setiap hari hampir selalu ada masyarakat yang meminta layanan ke pemerintahan desa.

Dengan sistem yang dibangun oleh Desa Kumbang, masyarakat yang ingin membuat surat atau apapun itu masyarakat juga bisa langsung mengunjungi *website* Desa Kumbang untuk melakukan pelayanan dengan cepat. Masyarakat tinggal mengklik apa yang dibutuhkan dan akan muncul beberpa pelayanan yang tertera, sehingga sekarang tidak perlu bergantung dengan menggunakan pelayanan manual, proses ini hanya perlu menginput NIK masyarakat dan sudah bisa menerima pelayanan yang di butuhkan. Pendekatan lain yaitu melalui aplikasi, di

mana masyarakat bisa langsung melakukan permintaan pelayanan melalui sosmed desa untuk meminta kebutuhan apa saja yang ingin diminta ke kantor desa, dengan mengirimkan NIK nya secara online tanpa datang ke kantor desa. Beberapa hal implementasi tentang keterbukaan informasi public di Desa Kumbang. Selain secara *online*, warga Desa Kumbang juga masih tetap bisa mengurus persuratan dengan datang ke kantor Desa Kumbang untuk menerima pelayanan secara langsung, utamanya untuk warga yang namanya belum masuk ke *database* Desa Kumbang (M. Taufik, Kepala Desa Kumbang, 2022).

Pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Desa Kumbang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di atas dapat dikatakan sebagai bentuk *e-government*. *E-Government* dalam *Journal of Public Sector Innovations* (2018) diartikan sebagai pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya kegiatan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses informasi publik, dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Komunikasi strategis dengan memanfaatkan *e-government* menurut Sanchez, Koh, Kappelman, dan Prybutok (2003) merupakan bentuk upaya pemerintah yang dapat meningkatkan pelayanan public yang lebih baik, karena menurunkan berbagai hambatan-hambatan komunikasi (*barriers*). Hambatan ini misalnya hambatan jarak dan waktu. Langkah memberikan dan menjalankan keterbukaan informasi public dan pelayanan masyarakat ini tidak akan memadai tanpa upaya strategis untuk mengatasi berbagai hambatan lama.

Evaluasi Komunikasi Strategis Desa Kumbang Dalam Pelayanan Informasi Publik

Evaluasi komunikasi adalah proses menilai komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau antara individu. Acuan untuk menilai keberhasilan komunikasi strategis dalam menjalankan komunikasi strategis untuk pelayanan informasi publik yaitu dapat dibagi menurut faktor internal dan eksternal. Faktor internal diperoleh berdasarkan penilaian masyarakat Desa Kumbang sendiri yang diperoleh melalui survei. Acuan keberhasilan komunikasi strategis dari sisi eksternal yaitu berdasarkan penilaian dari pihak di luar Desa Kumbang, yang dalam hal ini yaitu para penilai untuk Program Desa Banderang Informasi (Nasri, 2022).

Acuan untuk menilai keberhasilan komunikasi strategis dalam menjalankan komunikasi strategis untuk pelayanan informasi publik yaitu dapat dibagi menurut faktor internal dan eksternal. Faktor internal diperoleh berdasarkan penilaian masyarakat Desa Kumbang sendiri yang diperoleh melalui survei. Acuan keberhasilan komunikasi strategis dari sisi eksternal yaitu berdasarkan penilaian dari pihak di luar Desa Kumbang, yang dalam hal ini yaitu para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi:

1) Penilaian Internal

Penilaian internal untuk menganalisis keberhasilan komunikasi strategis Desa Kumbang penulis peroleh dari tingkat kepuasan masyarakat Desa Kumbang. Dalam rangka mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan dan lainnya di Desa Kumbang, Pemerintah Desa Kumbang dalam hal ini telah mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat yang diadakan dalam beberapa tahapan baik melalui daring (*form online*) dan maupun secara luring dengan penyebaran form langsung kepada masyarakat. Dalam melakukan survey tersebut Pemerintah Desa Kumbang melibatkan Kader Desa untuk penyebaran *form online* maupun kertas yang terkait dengan Survey tersebut.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Desa Kumbang yang dilaksanakan pada Akhir bulan Juni terkait dengan Kepuasan Pelayanan dan kebijakan Publik dimana Pemerintah Desa Kumbang menyebarkan 504 Form Survei Kepuasan Masyarakat dan telah menjawab dan mengembalikan form tersebut pada Juni 2022. Terkait dengan penilaian masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Pemerintah Desa Kumbang, sebanyak 1 Orang Responden Menjawab Buruk, 15 Orang Responden menjawab Cukup, 222 Orang Responden menjawab Baik, 119 Orang Responden menjawab Cukup Baik dan 125 Orang Responden menjawab Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan untuk kategori baik, cukup baik dan sangat baik mencapai 92% dari total responden yang disurvei (Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dan Konflik Kepentingan Desa Kumbang, 2022).

Selanjutnya terkait Bagaimana Tingkat Kepuasan Terhadap Kebijakan Publik Pemerintah Desa Kumbang, hasilnya 2 Orang Responden Menjawab Tidak Puas, 9 Orang Responden Menjawab Kurang Puas, 226 Orang Responden Menjawab Puas, 139 Orang Responden Menjawab Cukup Puas dan 104 Orang Responden Menjawab Sangat Puas. Sehingga jika disimpulkan sebanyak 466 dari 504 atau 93% masuk kategori puas, cukup puas, dan sangat

puas (Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dan Konflik Kepentingan Desa Kumbang, 2022).

Adanya kepuasan masyarakat Desa Kumbang terhadap pelayanan dan kebijakan publik Desa Kumbang berdasarkan hasil survei dan dikuatkan dengan pendapat kepala Desa dan kepala dusun di Desa Kumbang menurut hemat penulis sudah dapat menggambarkan keberhasilan dalam komunikasi strategis Desa Kumbang Program Desa Benderang Informasi Publik. Rasionalisasi dari hal ini yaitu jika komunikasi strategis desa tidak berhasil atau kurang efektif, maka tentu tidak akan menghasilkan kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah desa. Keberhasilan ini tentu dikuatkan dan dibuktikan juga dengan baiknya penilaian dari para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi.

2) Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal untuk menganalisis keberhasilan komunikasi strategis Desa Kumbang ini yaitu berdasarkan para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi. Menurut penjelasan Sekdes Desa Kumbang, terkait dengan kriteria penilaian Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa komponen penilaian. Pertama adalah bentuk komitmen desa yang dimana dalam komitmen Desa ini dituangkan dalam proses perkades maupun anggaran khusus yang dibuat oleh desa. Kedua adalah sumberdaya manusia yaitu artinya desa sudah mempersiapkan orang-orang yang akan mengelola informasi dan dokumentasi untuk dipublikasikan. Selanjutnya yaitu pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi. Selanjutnya yaitu terkait dengan dokumen apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kumbang utamanya terkait dengan transparansi.

Faktor penilaian keberhasilan lainnya yaitu terkait dengan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan serta mendengar aspirasi masyarakat, terutama sarana yang dipakai untuk hal tersebut serta media yang digunakan dalam keterbukaan informasi publik (sebagaimana sudah digambarkan dalam bab sebelumnya) adalah hal menentukan apakah Desa itu layak menjadi Desa yang berkomitmen untuk Keterbukaan Informasi Publik.

Bobot penilaian yang sudah berhasil dipenuhi dengan baik yaitu adanya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa, ada keterbukaan dan akses masyarakat

desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya, adanya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat, adanya Maklumat Pelayanan, adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa.

Berdasarkan penilaian, nilai Desa Kumbang berhasil mencapai bobot 95 dari 100. Nilai yang tinggi dalam hal layanan keterbukaan informasi publik berdasarkan penilaian dari para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi dalam hemat penulis dapat menjadi acuan untuk menganggap berhasilnya komunikasi strategis Desa Kumbang untuk keterbukaan informasi, sesuai dengan poin dalam visi misi Desa Kumbang yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa (Data Program Desa Benderang Informasi, 2021).

Berdasarkan data dari Tim Apresiasi Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Desa Kumbang (2021), acuan lain dalam menilai bahwa komunikasi strategis Desa Berhasil untuk keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari misi desa (pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif).

Bobot nilai yang tinggi para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi sehingga menjadikan Desa Kumbang sebagai Desa Terbaik ke-4 di Indonesia pada 2021 dalam hal pelayanan informasi publik, serta telah terpenuhi aspek kirtetria Apresiasi Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik, menurut hemat penulis telah dapat menjadi acuan keberhasilan Desa Kumbang dalam menjalankan komunikasi strategisnya, karena jika tidak efektif tentu para penilai tidak akan memberi nilai tinggi dan Desa Kumbang tidak akan mendapat penghargaan secara nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Desa Kumbang telah menjalankan komunikasi strategis yang mengacu pada pembuatan kebijakan dan panduan untuk aktivitas informasi yang konsisten dalam suatu organisasi, yang dalam hal ini desa Kumbang mengkomunikasikan konsep, proses, atau data yang memenuhi tujuan strategis jangka panjang desa.

Hal ini untuk menyampaikan pesan yang disengaja melalui media yang paling cocok untuk audiens yang ditunjuk pada waktu yang tepat untuk berkontribusi dan mencapai efek jangka panjang yang diinginkan. Tujuan utama komunikasi strategis desa Kumbang dalam konteks keterbukaan informasi adalah untuk melayani masyarakat dan menjalankan tanggung jawab penyelenggara desa sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hasil Penelitian ini merujuk pada kerangka konseptual komunikasi strategis yaitu struktur yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program komunikasi organisasi.

Upaya untuk menjalankan komunikasi strategis untuk keterbukaan informasi publik muncul berdasarkan perintah undang-undang yang menuntut hal tersebut, guna menjalankan peran tersebut, desa Kumbang membangun perencanaan dengan terlebih dahulu melakukan studi banding. Pada proses perencanaan desa Kumbang menerapkan komunikasi strategis dengan dua pendekatan, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi langsung dan tidak langsung merupakan dua bentuk komunikasi yang berbeda dalam cara penyampaiannya dan penggunaannya. Komunikasi langsung terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima pesan. Sedangkan, komunikasi tidak langsung melibatkan media atau alat untuk menyampaikan pesan, seperti Website, Media social, dan Baliho. Komunikasi strategis dijalankan dengan mengembangkan berbagai sarana komunikasi yang mempermudah layanan dan akses informasi publik untuk Desa Kumbang, seperti melalui media Website, Radio, Instagram, Facebook, Youtube, Pamflet, Pendekatan langsung dan Baliho pemerintah desa.

Komunikasi strategis desa Kumbang dapat dikatakan berhasil, karena penghargaan yang didapat berdasarkan penilaian internal dan eksternal. Faktor internal diperoleh berdasarkan penilaian masyarakat Desa Kumbang sendiri yang diperoleh melalui survei. Acuan keberhasilan komunikasi strategis dari sisi eksternal yaitu berdasarkan penilaian dari pihak di luar desa Kumbang, yang dalam hal ini yaitu para penilai untuk Program Desa Benderang Informasi.

Saran

Melalui penelitian ini penulis dapat menyarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk Desa Kumbang agar semakin meningkatkan komunikasi strategisnya untuk layanan masyarakat dan akses informasi publik, sehingga prestasi baik yang saat ini sudah diraih (posisi 5 nasional), dapat dipertahankan atau di tingkatkan.
2. Saran untuk desa-desa lain di Nusa Tenggara Barat yaitu agar dapat mengembangkan juga komunikasi strategis untuk pelayanan masyarakat desa dan keterbukaan informasi publik sebagai Desa Kumbang. Hal ini karena masih banyak desa yang belum serius mengelola *e-government*, media sosial, media cetak, dan sebagainya.
3. Saran untuk pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, agar semakin membantu pengembangan tata kelola desa yang baik, khususnya dalam hal penerapan teknologi informasi untuk mengembangkan *e-government*. Hal ini karena berdasarkan kasus yang penulis teliti *e-government* Desa Kumbang justru berkembang karena dibantu dan belajar dari daerah lain di luar Nusa Tenggara Barat sendiri.
4. Saran untuk peneliti lain untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian mengenai komunikasi strategis di tingkat desa, sehingga ilmu komunikasi dapat lebih kaya secara teoritis dan membantu kemajuan masyarakat secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alo Liliweri. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifin, Anwar. (1984). *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Bandung: ARMICO.
- Assidiqie, Jimly. 2003. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cangara, Hafied. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2019). *Effective Public Relations*. Pearson.
- Dinanti, E. P., & Mardiyah, S. U. K. (2017). Peran Media Center Humas Pemerintah Kabupaten sebagai Media Komunikasi Publik bagi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran-S1*, 6(2), 153-166.
- Effendy, O.U.2016. *Ilmu Komunikasi Teori Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (2017). *Managing Public Relations*. Routledge.
- Hasan, Erliana. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Jefkins, F. (2014). *Public Relations Techniques*. Routledge.

[Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi](#). (2019) *Dari desa membuka dunia*. Jakarta: Balilafto Kemdes PDTT.

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) (2022), *Laporan Final Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Perencanaan dan Penganggaran di Daerah*, Jakarta: Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.

Kulvisaechana, S (2001). *The Role of Communication Strategies in Change Management Process: A Case Study of Consigna Brand and Business Status Introduction*. *Journal Communication Spectrum*. 3(1).

Lattimore, D., Baskin, O., & Heiman, S. (2019). *Public Relations: The Profession and the Practice*. McGraw-Hill.

Lilweri, Alo. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.

Moenek Reydonnyzar, M.Devt.M. dkk. 2020. *System Informasi Pelayanan Publik*. Bandung.

Molleda, J. C., & Kochhar, S. (2019). *Global and Multicultural Public Relations*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ngalimun. (2017). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Praktis*.

Normore, A.H., Javidi, M. and Long, L.H. (2019) *Handbook of Research on Strategic Communication, leadership, and Conflict Management in modern organizations*. Hershey, PA: Business Science Reference, an imprint of IGI Global.

Paul, Christopher (2011). *Strategic Communication: Origins, Concepts, and Current Debates*. New York: Praeger Security International.

Prasanti, D., & Fuady, I. (2018). Pemanfaatan Media Komunikasi Dalam Penyebaran Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat (Studi Kualitatif tentang Pemanfaatan Media Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Kesehatan di Desa Cimanggu, Kab. Bandung Barat). *Reformasi*, 8(1), 8-14.

Prayitno, G., Subagiyo, A., Dinanti, D., & Sari, N. (2021). *Smart Village: Mewujudkan SDG's Desa Berbasis Keterpaduan Pengelolaan dan Inovasi Digital*. Universitas Brawijaya Press.

Rakhmat, Jalaludin. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Rhoni, Rodin. (2020). *Informasi Dalam Konteks Sosial Budaya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Sastro, Dhoho A, et.al. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum

Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (Vol. 2). John Wiley & Sons.

Schultz, D. E., & Kitchen, P. J. (2000). *Communication and Public Relations in a Changing World*. Routledge.

Sedarmayanti, (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju

Siahaan, SM. (1990). *Komunikasi Pemahaman dan Penerapannya*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Sriramesh, K., & Vercic, D. (2012). *The Global Public Relations Handbook: Theory, Research, and Practice*. Routledge.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Tommy. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi Dan Peran Manajemen Dalam Komunikasi*. Yogyakarta: CAPS
- Suprawoto. 2018. *Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Suryadi Edi. 2018. *Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suyatno, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tench, R., & Yeomans, L. (2017). *Exploring Public Relations*. Pearson.
- Tripathi, P.S. (2009) *Communication Management a global perspective*. New Dehli: Global India Publ.
- Wiener Norbert, (1950). *The Human Use of Human Beings*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
- Wursanto Ig (2001). *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Yogyakarta. Kanisius

JURNAL:

- .Kurnianti, A. W. (2018). Strategi komunikasi pemasaran digital sebagai penggerak desa wisata kabupaten wonosobo provinsi jawa tengah. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 180-190.
- Astuti, Herda, and Erman Erman. *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015*. Diss. Riau University, 2016.
- Febriananingsih, Nunuk. "Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.1 (2012): 135-156.
- Grahani, Adriana, and Rony Kurniawan. "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)." *res publica* 1.3 (2017): 41-56.
- Hallahan, K. *et al.* (2007) "Defining strategic communication," *International Journal of Strategic Communication*, 1(1), pp. 3–35. Available at: <https://doi.org/10.1080/15531180701285244>.
- Indah, Tiara, and Puji Hariyanti. "Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya." *Jurnal komunikasi* 12.2 (2018): 127-140.
- Ivanna, J. (2018). *Perencanaan Pembangunan Melalui Pendekatan Partisipatif*. Jurnal Generasi Kampus Volume 11, Nomor 1.
- Jupri, Ahmad, et al. "Edukasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah di Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Lombok Timur." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 3.2 (2020).
- Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.2 (2016): 231-244.
- Laila, Laila. "Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Publik." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 17.3 (2014).

- Masduki, 2010 "Keterbukaan Informasi Publik: Pengalam beberapa Negara, Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTIK-KOM) ." Volume 12 No1, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta.
- Naryoso, Agus. 2014 "Model Komunikasi Strategis untuk Mengatasi Teror HIV pada Kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK) Bandungan." Volume 14 No.3, Pengembangan Humaniora.
- Putri, Retno Aulia, and Yeni Rosilawati. "Komunikasi Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mensosialisasikan Kawasan Pedestrian di Malioboro." *Jurnal Audiens* 1.1 (2020): 88-99.
- Sanchez, A., Koh, C., Kappelman, L., & Prybutok, V. (2003). The relationship between IT for communication and e-government barriers. *AMCIS 2003 Proceedings*, 104.
- Suryani, Dewi Amanatun. "Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12.1 (2017): 35-44.
- Syafriyani, I., & Zaituna, Y. P. (2018). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi Di Bkpsdm Kabupaten Sumenep. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 28-34.
- Wahyunadi, Wahyunadi, et al. "Sosialisasi dan Pendampingan Bumdes Menjadi TDC di Desa Kumbang Kecamatan Masbagik." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4.3 (2021).
- Wurara, Citta NC, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas. "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)." *Jurnal Eksekutif* 2.5 (2020).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BPK RI (2019) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sumber lain:

Arki FM Friendly Radio on November 5, 2017 Arkifm News " *Festival DBIP, Kepala Desa Se-Indonesia Bakal Datangi NTB.*" januari 2020.

Diskominfo Lombok Timur, (2021) "[Desa Kumbang Wakili NTB Di Tingkat Nasional Dalam Ajang Desa Benderang Informasi Publik](https://diskominfo.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-464-desa-kumbang-wakili-ntb-di-tingkat-nasional-dalam-ajang-desa-benderang-informasi-publik.html)". 29 April 2021. <https://diskominfo.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-464-desa-kumbang-wakili-ntb-di-tingkat-nasional-dalam-ajang-desa-benderang-informasi-publik.html> diakses tanggal 10 November 2022.

Diskominfotik NTB, (2021) "[Artikel KI NTB Apresiasi Keterbukaan Informasi di Desa Kumbang](https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/ki-ntb-apresiasi-keterbukaan-informasi-di-desa-kumbang669.html)". 9 September 2021. <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/ki-ntb-apresiasi-keterbukaan-informasi-di-desa-kumbang669.html> diakses tanggal 10 November 2022.

M. Syahrul Utama "Dalam Ajang Desa Benderang Infomasi Publik, Desa Kumbang Wakili NTB Di Tingkat Nasional". 29 April 2021. https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/sasambo/pr/107_184_57_03/dalam-ajang-desa-benderang-informasi-publik-desa-kumbang-wakili-ntb-di-tingka-t-na-sio-n-al-ini-pesan-bupati diakses pada tanggal 20 januari 2020.

Pemerintah Kota Yogyakarta (2011). *E-Government Yogyakarta Terbaik Kategori Kabupaten/Kota*. 22 September 2011. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/2835>, 17 November 2022.

PPID Provinsi NTB “Sekilas Tentang PPID”. 3 Jul 2017. <https://ppid.ntbprov.go.id/halaman-11-sekilas-tentang-ppid.html> diakses tanggal 10 November 2022.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lotimr, (2021) “Kumbang Peringkat 5 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik”. 28 September 2021. <https://portal.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-999-kumbang-peringkat-5-implementasi-keterbukaan-informasi-publik.html> diakses tanggal 10 November 2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2018-2024. <https://kumbang.desa.id/produk-hukum/rpjmdes/>, diakses 28 Desember 2022

Tira Santia “Daftar 10 Desa Terbaik se-Indonesia Dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik 2021”. 28 September 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4669817/daftar-10-desa-terbaik-se-indonesia-dalam-penerapan-keterbukaan-informasi-publik> diakses tanggal 10 Juni 2022.

Tobari “Sekda NTB : Melalui DBIP Semua Program Desa Diketahui Masyarakat”. 3 Agustus 2019. <http://www.infopublik.id/kategori/nusantara/363806/sekda-ntb-melalui-dbip-semua-program-desa-diketahui-masyarakat?video> diakses tanggal 10 November 2022.